



PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP DISINSENTIF BEKERJA RUMAH TANGGA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
THE IMPACT OF FAMILY HOPE PROGRAM ON BENEFICIARY FAMILIES (KPM) HOUSEHOLDS WORK DISINCENTIVES

DOI: <http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.2550>

Syahna Salsabila ^{1✉}, **Evi Yulia Purwanti**²

^{1,2}Universitas Diponegoro

✉ syahnaslsbla@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PKH sebagai bantuan tunai terhadap disinsentif bekerja rumah tangga penerima manfaat yang dilihat dari pengurangan jam kerja rumah tangga. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik biner terhadap data primer yang diperoleh melalui survei secara individu terhadap 100 rumah tangga KPM PKH di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Ditemukan bahwa secara keseluruhan, PKH berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga. Berkurangnya jam kerja rumah tangga terkonsentrasi atau didominasi oleh pengurangan jam kerja isteri. Sementara pengurangan jam kerja kepala keluarga memiliki peran namun tidak besar dalam pengurangan jam kerja rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa jam kerja isteri lebih responsif dibandingkan dengan jam kerja kepala keluarga ketika terdapat sebuah bantuan sosial yang diberikan.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat, Disinsentif Bekerja

Abstract

The purpose of this study is to analyze the impact of PKH on Beneficiary Families (KPM) households work incentives that can be seen from the reduction in household hours worked. This type of data used is primary data obtained through an individual survei of 100 Beneficiary Families (KPM) in Bulakamba District, Brebes Regency. The analytical method used in this study is binary logistic regression. The results of the study on the overall of Beneficiary Families (KPM) household scopes showed that the variable proportion of PKH assistance, the proportion of household income significantly influence the reduction in the number of working hours of Beneficiary Families (KPM) households in Bulakamba District. The reduction in household working hours is concentrated or dominated by the decrease of wife's working hours. While the reduction in working hours of the head of the family does not have a big role in reducing household work hours. This shows that the wife's working hours are more responsive than the head of the family's working hours when there is a social assistance provided.

Keywords: Program Keluarga Harapan, Beneficiary Families, Work Disincentives

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai bersyarat atau *Conditional Cash Transfer (CCT)* di bidang ekonomi dan sosial yang disasarkan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. PKH ini ditujukan untuk mengubah perilaku yang selanjutnya dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi, yang diluncurkan Pemerintah Indonesia sejak Juli 2007 di 7 provinsi. Dengan adanya PKH, Keluarga Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan serta akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

PKH ini membantu masyarakat miskin untuk memperoleh akses dalam hal pendidikan maupun kesehatan, program ini setiap tahunnya mengalami kenaikan baik pada anggaran PKH maupun cakupan KPM PKH. Akan tetapi perlu diketahui dampak PKH terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam bekerja. Beberapa penelitian yang dilakukan pada program-program CCT ataupun *Income Support* menemukan bahwa program kesejahteraan semacam ini berpotensi untuk memunculkan disinsentif untuk bagi bekerja penerima manfaat ketika program tersebut diimplementasikan. Bingley dan Walker (2013) menemukan bantuan uang tunai dan barang yang diberikan dapat mengurangi pasokan tenaga kerja, terutama pada rumah tangga yang dikepalai oleh wanita. Alzúa, Cruces, dan Ripani (2013) secara lebih spesifik menemukan bahwa pada PROGRESA terjadi pengurangan partisipasi kerja pada tenaga kerja wanita, sedangkan pada program RPS terjadi pengurangan partisipasi bekerja pada tenaga

kerja dewasa. Sejumlah penelitian tersebut menimbulkan argumen mengenai munculnya efek negatif yang disebabkan oleh adanya program kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Brebes terus dilakukan secara berkelanjutan, dimana Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak dan menjadi penerima anggaran PKH terbesar serta memiliki KPM terbanyak Provinsi Jawa Tengah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Brebes tercatat mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada Kecamatan Bulakamba dengan jumlah KPM terbanyak, ditemukan bahwa selama tahun 2014 hingga tahun 2018 terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk. Mata pencaharian yang mulanya didominasi oleh buruh tani kemudian terjadi pengurangan dan disisi lain terjadi peningkatan pada mata pencaharian pedagang dan lainnya.

Beberapa penelitian mengenai efek disinsentif mulai banyak dilakukan di beberapa negara berkembang, sementara itu penelitian sejenis dengan kasus di Indonesia relatif masih terbatas. Dalam melihat dampak program berbasis CCT, penelitian sebelumnya dilakukan di negara lain sesuai dengan program masing-masing negara. Implementasi PKH di Indonesia disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia sehingga menimbulkan reaksi atau perubahan perilaku dari masyarakat penerima manfaat setelah memperoleh PKH. Berdasarkan beberapa studi sebelumnya di berbagai negara dapat dikatakan terdapat isu perubahan perilaku masyarakat berupa disinsentif bekerja yang dilakukan penerima manfaat setelah adanya program. Oleh karena itu, studi ini melakukan analisis mengenai bagaimana dampak dari PKH terhadap disinsentif bekerja KPM PKH.

LANDASAN TEORI

Teori Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Pilihan seseorang untuk bekerja atau menikmati waktu luang dapat dilihat dalam teori *labor/leisure choice*. Diasumsikan bahwa waktu luang merupakan barang normal atau *normal goods*, sehingga ketika pendapatan naik, maka waktu luang juga mengalami peningkatan. Para pekerja dapat menggunakan preferensi mereka yang berhubungan dengan jam kerja dalam menentukan jam kerja mereka (Ehrenberg & Smith, 2009).

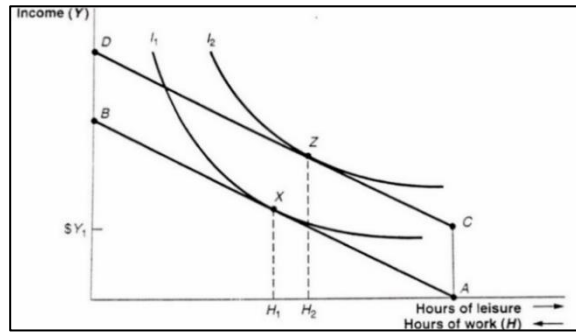
Utilitas, Preferensi Pekerja, dan Batas Anggaran

Fungsi utilitas menunjukkan konsumsi barang dan waktu luang seseorang ke dalam indeks U yang mengukur tingkat kepuasan seseorang. Indeks ini disebut *utility* atau utilitas. Semakin tinggi tingkat utilitas (U), maka seseorang semakin merasa puas atau senang. Seorang individu harus mengurutkan dan memilih diantara dua pilihan yaitu waktu luang (*leisure*) atau penghasilan dari bekerja. Terdapat *trade-off* yang dihadapi setiap pekerja dalam melihat antara waktu luang dengan pendapatan bekerja. Konsumsi barang dan waktu luang seseorang terbatas oleh waktu dan pendapatan seseorang tersebut. Bagian dari pendapatan seseorang (seperti pendapatan *property*, *dividen*, *hadiah lotre*) tidak tergantung pada berapa banyak seseorang bekerja. Inilah yang disebut dengan pendapatan tidak bekerja atau *non-labor income* (V). Kemudian besaran jam yang dialokasikan seseorang pada pasar kerja pada suatu periode

dinotasikan dengan h dan tingkat upah per jam dinotasikan dengan w . *Budget Constraint* atau Batas Anggaran dapat dituliskan sebagai berikut:

$$C = wh + V$$

Sehingga dapat dikatakan, nilai uang dari pengeluaran untuk barang (C) harus sama dengan rata-rata penghasilan (wh) dan pendapatan non-bekerja (V). *Budget Constraint* menunjukkan semua variasi dari kombinasi atas pendapatan (*income*) dan jam kerja yang tersedia untuk individu dalam menghasilkan upah.



Gambar 1. Efek Peningkatan *Non-Labor Income* Terhadap Jam Kerja

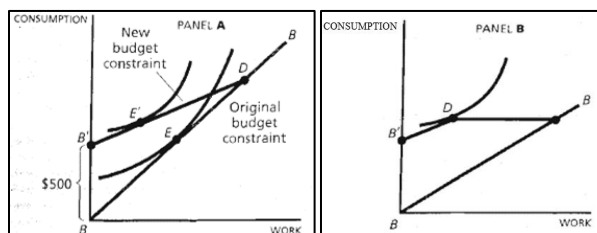
Sumber: Kaufman & Hotchkiss, 1999

Adanya *non-labor income* yang diterima individu menyebabkan *budget constraint* bergeser ke atas, sehingga dimungkinkan untuk mencapai kurva indifferen dan tingkat *utility* yang lebih tinggi. Pada gambar 1 ditunjukkan ketika terjadi penambahan *non-labor income*, maka tingkat keseimbangan jam kerja akan berkurang dan waktu luang (*leisure*) akan semakin bertambah. Hubungan antara perubahan pendapatan (*income*) dan perubahan jumlah jam kerja menunjukkan konsep dalam teori penawaran tenaga kerja, yaitu *income effect*. *Income effect* merupakan perubahan pada jam kerja yang disebabkan adanya perubahan pendapatan dengan menganggap tingkat upah konstan. Jika waktu

luang atau *leisure* merupakan *normal good*, maka tanda dari *income effect* negative (Kaufman & Hochkiss, 1999).

Program Kesejahteraan dan Insentif Bekerja

Terdapat dampak dari adanya program yang menyokong pendapatan terhadap insentif orang bekerja, banyak oposisi program kesejahteraan menduga bahwa program ini dapat mendorong penerima manfaat untuk hidup hanya dari bantuan program dan bergantung pada bantuan publik/pemerintah (Borjas, 2012).



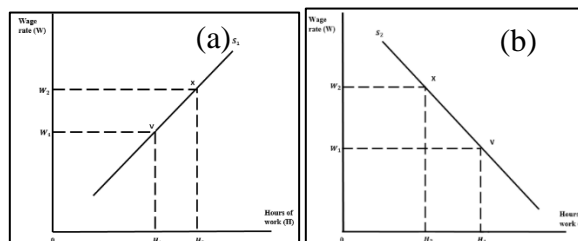
Gambar 2. Dampak Program Kesejahteraan terhadap Penawaran Tenaga Kerja
Sumber: Stiglitz, 2000

Panel A pada gambar 2 memperlihatkan *budget constraint* dan *Indifference curve* untuk menunjukkan dampak yang merugikan dari adanya program kesejahteraan terhadap individu dalam bekerja. *Budget constraint* B'DB menunjukkan *budget constraint* ketika telah memperoleh bantuan program kesejahteraan sehingga individu memiliki pendapatan tetap, diilustrasikan dalam gambar 2 sebesar \$500. Sehingga memunculkan keseimbangan baru yang ditandai oleh pergeseran dari titik E menjadi E' dengan tingkat bekerja yang lebih rendah dari sebelumnya. Pengurangan dalam bekerja diakibatkan adanya efek pendapatan (*income effect*) dan efek substitusi (*substitution effect*). Efek pendapatan ditunjukkan ketika individu merasa lebih baik sehingga individu

mengurangi waktu bekerja dan lebih banyak menikmati waktu luang. Efek substitusi terjadi ketika insentif individu dalam bekerja berkurang karena adanya pengurangan pengembalian untuk bekerja dengan jam kerja tambahan. Panel B menunjukkan *budget constraint* di bawah program kesejahteraan dimana seseorang kehilangan sejumlah uang, misal satu dollar, untuk setiap dollar yang ia hasilkan di luar jumlah minimum tertentu sehingga individu akan memilih untuk bekerja hanya untuk menghasilkan tingkat pendapatan tersebut.

Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Kurva penawaran tenaga kerja mencerminkan hubungan antara tingkat upah dan jam kerja yang ditawarkan di pasar. Ketika upah naik, terdapat perbedaan dampak pada jam kerja individu yaitu peningkatan jam kerja dan pengurangan jam kerja.



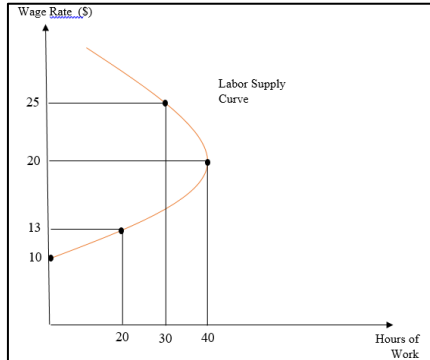
Gambar 3. Kurva Penawaran Tenaga Kerja Forward Sloped (a) and Negatively Sloped (b)
Sumber: Kaufman & Hotchkiss, 1999

Gambar 3 menunjukkan perbedaan *slope* antara gambar (a) dan gambar (b). Pada gambar (a), kurva penawaran S_1 memiliki *slope* positif yang berarti jika tingkat upah meningkat, terjadi penambahan jam kerja yang lebih besar yang diputuskan individu. Pada saat seperti itu terjadi *substitution effect* yang mendominasi *income effect*. *Substitution effect* ditunjukkan ketika kenaikan tingkat upah menjadikan harga waktu yang lebih mahal, nilai waktu yang lebih

tinggi mendorong keluarga mensubstitusikan waktu luang untuk lebih banyak bekerja menambah konsumsi barang (Simanjuntak, 1999:54).

Sedangkan pada gambar (b), menunjukkan kurva penawaran S_2 dengan slope negatif, yaitu jika tingkat upah semakin tinggi, individu akan mengurangi jam kerja. Hal ini menunjukkan *income effect* yang lebih besar dari *substitution effect*.

Gambar 4 memperlihatkan hubungan antara jumlah jam kerja optimal dan tingkat upah. Awalnya, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif saat jam kerja dan tingkat upah bergerak secara bersama, dimana ketika slope naik ke atas mencerminkan efek substitusi lebih mendominasi. Ketika upah meningkat di atas \$20, efek pendapatan mendominasi dan jam kerja berkurang saat upah naik, sehingga kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope yang negative.



Gambar 4. Kurva Penawaran Tenaga Kerja (Hubungan antara Jam Kerja Optimal dan Tingkat Upah)

Sumber: Borjas, 2012

Kurva penawaran tenaga kerja disebut *backward-bending labor supply curve* yang menerangkan bahwa upah yang rendah mendorong individu untuk menambah pendapatannya, sehingga terjadi *substitution effect* yang lebih besar dari *income effect*. Pada individu berpendapatan tinggi yang telah

memenuhi kebutuhannya, tenaga kerja akan mengurangi jam kerjanya dan lebih banyak memiliki waktu luang (*leisure*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif menggunakan angka sebagai data pokoknya, sehingga analisisnya menggunakan prinsip-prinsip statistik.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dimana objek dari penelitian ini adalah perubahan jam kerja atau penawaran tenaga kerja di wilayah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes setelah memperoleh bantuan sosial PKH.

Target/Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Brebes tahun 2019 sebanyak 119.357 KPM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berada di wilayah dengan KPM terbanyak di Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Bulakamba. Beberapa desa ditetapkan untuk pengambilan sampel, yaitu Desa Kluwut, Desa Petunjungan, Desa Pakijangan, Desa Banjaratma, Desa Siwuluh, Desa Tegalglagah, dan Desa Luwungragi yang

terletak di Kecamatan Bulakamba. Untuk menentukan ukuran sampel penelitian dari populasi digunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

E = Persentase kelonggaran ketidakteelitian (presisi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Dalam penelitian ini diketahui N sebesar 119.357 KPM, sedangkan e ditetapkan sebesar 10%. Sehingga jumlah minimal sampel yang diambil oleh peneliti adalah sebesar 99,9 responden (dibulatkan ke atas menjadi 100 responden)

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh sampel sebanyak 100 responden yang akan diambil pada beberapa desa di Kecamatan Bulakamba dengan proporsi sampel yang ditunjukkan Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi dan *Proportional Random Sampling* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Tujuh Desa di Kecamatan Bulakamba Tahun 2019

Desa	Jumlah KPM	Jumlah Sampel	Pembulatan
Kluwut	1315	25,48	25
Petunjungan	575	11,14	11
Tegalglagah	683	13,23	13
Luwungragi	811	15,71	16
Banjaratma	557	10,79	11
Pakijangan	837	16,22	16
Siwuluh	383	7,42	8
Jumlah	5161		100

Sumber: UPPKH Kecamatan Bulakamba, 2019, diolah

Pengambilan dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan

metode *purposive proportional random sampling*, yaitu dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan atau pertimbangan tertentu. Teknik sampling ini digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam mengidentifikasi identitas dan karakteristik dari responden dengan mengacu pada transformasi data mentah ke dalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah memahami dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Kemudian metode analisis regresi logistik digunakan untuk melihat ketepatan model menempatkan secara benar kategori responden. Selain itu variabel dependen berbentuk *dummy* atau dapat dikatakan bersifat kualitatif biner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model logit dengan dua pilihan yang sering disebut dengan *binary logistic regression*. Dalam penelitian kali ini, variabel dependen memiliki dua pilihan yaitu pengurangan jumlah jam kerja setelah program transfer diberi angka 1 dan tidak mengalami pengurangan jam kerja setelah program transfer diberi 0.

Berdasarkan model regresi logistik untuk keseluruhan yaitu rumah tangga menerima manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DHW_i (Y) = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \alpha + \beta_1 PKH_1 + \beta_2 IncomeProp_2 + \beta_3 FamilySize_3 + \mu_i$$

Pengurangan Jam Kerja rumah tangga terdiri dari pengurangan jam kerja kepala keluarga dan pengurangan jam kerja isteri, sehingga diperoleh $DHW_i = DHW_{KK} + DHW_{isteri}$. Kemudian untuk model regresi logistic dalam penelitian ini dijabarkan berdasarkan kepala keluarga dan isteri. Model regresi logistik untuk kepala keluarga yaitu sebagai berikut:

$$DHW_{KK} = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \alpha + \beta_1 PKH_1 + \beta_{2P1} Income_{KK2P1} + \beta_3 FamilySize_3 + \beta_{4D1} Edu_{KK4D1} + \beta_{5U1} Age_{KK5U1} + \mu_i$$

Kemudian model logistik untuk isteri adalah sebagai berikut:

$$DHW_{Isteri} = \ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \alpha + \beta_1 PKH_1 + \beta_{2P2} Income_{Isteri2P2} + \beta_3 FamilySize_3 + \beta_{4D2} Edu_{Isteri4D2} + \beta_{5U2} Age_{Isteri5U2} + \mu_i$$

Dimana:

Li = variabel terikat atau variabel dependen *dummy*, bernilai 1 jika peristiwa tersebut terjadi dan bernilai 0 jika peristiwa tersebut tidak terjadi

$$\ln \left[\frac{P_i}{1-P_i} \right] = \ln \left[\frac{\text{Terjadi pengurangan jam kerja}}{\text{Tidak terjadi pengurangan jam kerja}} \right]$$

α = konstanta

$\beta_1 \dots \beta_7$ = koefisien regresi masing-masing variabel tidak terikat atau variabel independen

DHW = *Decreasing Hours of Work* atau Pengurangan Jam Kerja

X_1 = Bantuan (PKH)

X_2 = Proporsi Penghasilan

X_{2P1} = Penghasilan Kepala Keluarga

X_{2P2} = Penghasilan Isteri

X_3 = Jumlah Anggota Keluarga

X_{4D1} = Pendidikan Kepala Keluarga

X_{4D2} = Pendidikan Isteri

X_{5U1} = Usia Kepala Keluarga

X_{5U2} = Usia Isteri

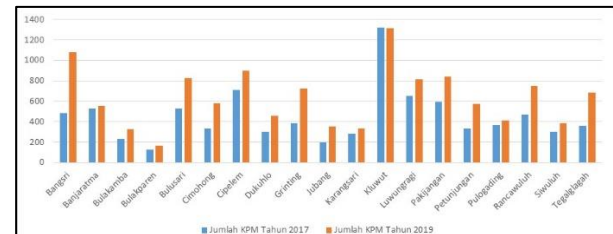
μ_i = Gangguan stokastik

Kemudian dilakukan pula pengujian statistik yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai statistik F, dan nilai statistik Z.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bulakamba

PKH sudah diimplementasikan oleh pemerintah sejak tahun 2007, dan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan baik dari anggaran maupun jumlah KPM yang dicakup. Dalam pelaksanaannya, PKH didasarkan pada komponen yang suatu keluarga atau rumah tangga dalam satu kartu keluarga (KK), dimana setidaknya satu keluarga memiliki satu komponen PKH yang telah ditentukan. Komponen tersebut diantaranya anak sekolah, balita, ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. PKH mulai dilaksanakan di Kabupaten Brebes mulai tahun 2011



Gambar 5. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Bulakamba Menurut Desa Pada Tahun 2017 dan Tahun 2019
Sumber: UPPKH Kecamatan Bulakamba, 2019 (diolah)

Berdasarkan gambar 5, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari PKH pada tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2017 hampir pada seluruh desa di Kecamatan Bulakamba. Jumlah KPM di Kecamatan Bulakamba pada tahun 2017 yaitu

sebanyak 8.485 KPM, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebanyak 12.060 KPM.

merupakan rumah tangga pra sejahtera atau keluarga miskin yang setidaknya memiliki satu komponen PKH.

Karakteristik Rumah Tangga Responden

Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sejumlah 100 responden. Rumah tangga ini

Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Responden Berdasarkan Proporsi Bantuan PKH dan Proporsi Penghasilan

Karakteristik	Kelompok	Persentase Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)	Persentase Tidak Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)	Jumlah
Proporsi Bantuan PKH	0 - 10,00	58,54	41,46	41
	10,01 - 20,00	82,61	17,39	46
	20,01 - 30,00	91,67	8,33	12
	30,01 - 35,00	100,00	0,00	1
Jumlah				100
Proporsi Penghasilan Rumah Tangga (%)	0 - 40,00	83,33	16,67	6
	40,01 - 80,00	77,46	22,54	71
	80,01 - 120,00	63,64	36,36	22
	120,00 - 160,00	0,00	100,00	1
Jumlah				100

Sumber: Data Primer, 2020, diolah

Proporsi bantuan PKH merupakan proporsi total dana yang diperoleh dari PKH dibandingkan dengan total pengeluaran rumah tangga KPM. Dari 100 rumah tangga, proporsi bantuan PKH terkecil adalah 2,50% sedangkan yang terbesar adalah 34,29%. Jika dilihat pada lingkup rumah tangga terdapat sebanyak 46 rumah tangga KPM PKH berada pada tingkat proporsi bantuan PKH sebanyak 10,01-20,00%, sehingga ditunjukkan bahwa rumah tangga KPM didominasi dengan perolehan bantuan PKH dengan proporsi 10,01-20,00%. Pada proporsi ini rata-rata bantuan yang diperoleh rumah tangga sebesar 300.000 rupiah/bulan dengan pengeluaran rata-rata rumah tangga sebesar 2.170.000 rupiah/bulan.

Persentase terbesar terjadinya pengurangan jam kerja rumah tangga yaitu

100% berada pada proporsi bantuan 30,01 – 35,00, dimana terdapat satu KPM pada kelompok proporsi bantuan tersebut. Kemudian pada fenomena tidak terjadinya pengurangan jam kerja, persentase terbesar ditemukan pada kelompok proporsi bantuan PKH 0 – 10,00 yaitu dengan persentase sebesar 41,46 persen. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar proporsi bantuan PKH, rumah tangga cenderung tidak mengurangi jam kerjanya.

Proporsi penghasilan menunjukkan besarnya persentase total penghasilan yang diperoleh suatu rumah tangga terhadap total pengeluaran rumah tangga tersebut. Proporsi penghasilan didominasi pada kelompok 40,01-80,00% yaitu sebanyak 71 rumah tangga KPM. Persentase rumah tangga yang mengalami

pengurangan jam kerja paling besar ada pada kelompok proporsi penghasilan 0 – 40,00 yaitu 83,33%. Kelompok proporsi penghasilan 0 – 40,00 ini memiliki penghasilan rata-rata rumah tangga 825.000 rupiah dengan pengeluaran rata-rata rumah tangga 2.300.000 rupiah. Pada fenomena tidak terjadinya pengurangan jam kerja, persentase paling besar ada pada

kelompok proporsi penghasilan 120,00 – 160,00. Pada proporsi penghasilan ini pendapatan rata-rata rumah tangga sebesar 4.800.000 rupiah dengan pengeluaran rata-rata rumah tangga sebesar 3.000.000 rupiah. Pada proporsi penghasilan tersebut rumah tangga dengan pengasilannya dapat menutup seluruh pengeluaran rumah tangga per bulan.

Tabel 3. Karakteristik Rumah Tangga Responden Berdasarkan Penghasilan

Penghasilan (Rupiah) / Bulan	Kepala Keluarga		Isteri	
	Persentase Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)	Persentase Tidak Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)	Persentase Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)	Persentase Tidak Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)
0 - 500.000	40	60	69,88	30,12
500.001 - 1.000.000	26,67	73,33	35,71	64,29
1.000.001 - 1.500.000	5	95	50	50
1.500.001 - 2.000.000	7,69	92,31	0	100
2.000.001 - 2.500.000	0	100	0	0
2.500.001 - 3.000.000	0	100	0	0

Sumber: Data Primer, 2020, diolah

Berdasarkan tabel 3 pengurangan jam kerja kepala keluarga didominasi pada kelompok penghasilan 0 – 500.000 rupiah dan 500.001 – 1.000.000 rupiah dengan persentase masing-masing 40% dan 26,67%.. Sedangkan Persentase isteri yang mengalami pengurangan jam kerja paling banyak berada pada kelompok penghasilan 0 – 500.000 rupiah yaitu sebesar 69,88%, dimana pada kelompok penghasilan ini merupakan kelompok dengan penghasilan paling rendah. Kemudian terlihat bahwa pada kelompok penghasilan yang lebih tinggi, orang cenderung untuk tidak melakukan pengurangan jam kerja. Penghasilan isteri paling besar berada pada kelompok penghasilan 1.500.001 – 2.000.000 rupiah. Pengurangan jam kerja rumah tangga terkonsentrasi pada isteri seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, dimana Persentase isteri yang mengalami pengurangan jam kerja

paling banyak berada pada kelompok penghasilan 0 – 500.000 rupiah yaitu sebesar 69,88%, dimana pada kelompok penghasilan ini merupakan kelompok dengan penghasilan paling rendah. Pada kelompok penghasilan yang lebih tinggi, orang cenderung untuk tidak melakukan pengurangan jam kerja. Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada terdapat satu orang kelompok penghasilan 1.500.001 – 2.000.000 sehingga menghasilkan persentase 100% pada fenomena tidak terjadinya pengurangan jam kerja.

Tabel 4. Karakteristik Rumah Tangga Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Kelompok Usia	Jumlah (Orang)	Persentase Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)	Persentase Terjadi Pengurangan Jam Kerja (%)
Kepala Keluarga	26 - 36	20	15	85
	37 - 46	40	22,5	77,5
	47 - 56	27	14,81	85,19
	57 - 66	9	22,22	77,78
	67 - 76	4	50	50
Isteri	21 - 30	15	73,33	26,67
	31 - 40	45	71,11	28,89
	41 - 50	28	60,71	39,29
	51 - 60	9	33,33	66,67
	61 - 70	3	33,33	66,67

Sumber: Data Primer, 2020, diolah

Berdasarkan tabel 4, jumlah kepala keluarga terbanyak berada pada kelompok usia 37 – 46 tahun sebanyak 40 orang. Dari 100 kepala keluarga, hanya terdapat 20 kepala keluarga yang mengalami pengurangan jam kerja. Terlihat persentase usia kepala keluarga yang tidak terjadi pengurangan jam kerja lebih besar dibandingkan persentase usia kepala keluarga yang mengalami pengurangan jam kerja. Pada fenomena atau keadaan terjadinya pengurangan jam kerja ditemukan pada kelompok usia 67 – 76 tahun dengan persentase paling besar yaitu 50%. Selanjutnya pada isteri ditemukan secara keseluruhan mulai dari usia 21 tahun hingga 50 tahun persentase orang yang mengalami pengurangan jam kerja lebih banyak dibandingkan dengan persentase yang tidak mengalami pengurangan jam kerja. Penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja di dominasi kelompok usia 21-30 tahun yaitu sebesar 73,33%. Sedangkan pada kelompok usia 51-60 tahun dan 61-70 tahun di dominasi oleh penduduk yang tidak mengalami pengurangan jam kerja dengan persentase 66,67%. Pada isteri, terlihat bahwa semakin tua usia, persentase usia yang mengalami pengurangan jam kerja semakin menurun.

Interpretasi Hasil Analisis Regresi Logistik

Pada penelitian ini, pengurangan jam kerja rumah tangga terdiri dari pengurangan jam kerja kepala keluarga dan pengurangan jam kerja isteri. Pada lingkup rumah tangga secara keseluruhan, untuk mengestimasi kondisi dalam rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperlukan beberapa variabel yaitu proporsi bantuan PKH, proporsi penghasilan rumah tangga, dan jumlah tanggungan keluarga. Variabel-variabel tersebut merupakan variabel yang dapat dilihat dan diperoleh dalam ruang lingkup rumah tangga. Kemudian, dalam melakukan estimasi pada pengurangan jam kerja kepala keluarga dan isteri, masing-masing memerlukan lima variabel, yaitu, proporsi bantuan PKH, penghasilan suami dan isteri, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan kepala keluarga dan isteri, serta usia kepala keluarga dan isteri.

Proporsi Bantuan PKH

Dalam lingkup rumah tangga secara keseluruhan, variabel proporsi bantuan PKH berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga. Sehingga semakin besar proporsi bantuan PKH, maka semakin besar kemungkinan

rumah tangga tersebut untuk melakukan pengurangan jam kerja.

Tabel 5. Hasil Pengaruh PKH Terhadap Pengurangan Jam Kerja menurut Rumah Tangga, Kepala Keluarga, dan Isteri

Variabel Independen	Rumah Tangga	Kepala Keluarga	Isteri
Proporsi Bantuan PKH (X ₁)	Signifikan	Tidak Signifikan	Signifikan
Proporsi Penghasilan Rumah Tangga (X ₂)	Signifikan	-	-
Penghasilan Suami (X ₂ .D ₁)	-	Signifikan	-
Penghasilan Isteri (X ₂ .D ₂)	-	-	Signifikan
Jumlah Tanggungan Keluarga (X ₃)	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan
Pendidikan Suami (X ₄ .D ₁)	-	Tidak Signifikan	-
Pendidikan Isteri (X ₄ .D ₂)	-	-	Tidak Signifikan
Usia Suami (X ₅ .D ₁)	-	Tidak Signifikan	-
Usia Isteri (X ₅ .D ₂)	-	-	Signifikan

Sumber: Hasil Output Eviews (diolah)

$$Y_{\text{isteri}} = 5,985967 + 0,108542 (X_1)^* - 4,10E-06 (X_2.D_2)^* - 0,280528 (X_3) - 0,102111 (X_4.D_2) - 0,081534 (X_5.D_2)^*$$

Ket: *: signifikan pada level 5% uji Z

Pengurangan jam kerja rumah tangga ini terdiri dari pengurangan jam kerja kepala keluarga dan pengurangan jam kerja isteri, maka jika dilihat dalam aspek kepala keluarga dan isteri. Pada pengurangan jam kerja isteri, variabel proporsi bantuan PKH berpengaruh positif signifikan. Semakin besar proporsi bantuan PKH, semakin besar kemungkinan untuk terjadinya pengurangan jam kerja isteri, sedangkan variabel proporsi bantuan PKH tidak signifikan terhadap pengurangan jam kerja kepala keluarga. Kepala keluarga cenderung tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sedangkan pengurangan jam kerja pada beberapa kepala keluarga terjadi karena adanya peralihan pekerjaan. Selain itu, bantuan PKH yang diberikan tidak begitu besar sehingga bantuan tersebut tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga penghasilan kepala keluarga dalam bekerja

tetap diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa pada rumah tangga, pengurangan jam kerja terkonsentrasi pada pengurangan jam kerja isteri. Selain itu, Teixeira (2010) juga menemukan hal yang sama dimana pengurangan jam kerja lebih banyak terjadi pada penerima manfaat wanita. Hal serupa juga ditemukan pada hasil penelitian Williamson & Whitmore (2012) yaitu pengurangan jam kerja yang terkonsentrasi pada tenaga kerja wanita setelah program *Food Stamps Program (FSP)* dijalankan. Secara umum, temuan pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervin Prifti, dkk. menemukan bahwa program *cash transfer* menyebabkan terjadinya perubahan pola pekerjaan yang dilakukan rumah tangga penerima manfaat, dimana hal tersebut bergantung pada besaran dari jumlah bantuan tunai yang diberikan.

Pengaruh Proporsi Penghasilan Rumah Tangga, Penghasilan Kepala Keluarga, dan Penghasilan Isteri

Variabel proporsi penghasilan rumah tangga berpengaruh negatif signifikan terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga. Hal tersebut berarti, semakin kecil proporsi penghasilan rumah tangga maka semakin besar kemungkinan rumah tangga untuk mengurangi jam kerja. Proporsi penghasilan merupakan besarnya peran penghasilan rumah tangga dalam menutupi pengeluaran rumah tangga. Hal itu berarti ketika proporsi penghasilan rumah tangga rendah maka mengindikasikan penghasilan yang rendah. Proporsi penghasilan rumah tangga terdiri dari penghasilan kepala keluarga, penghasilan isteri, dan pendapatan non bekerja di luar bantuan PKH. Pada lingkup kepala keluarga, variabel penghasilan kepala keluarga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengurangan jam kerja kepala keluarga, artinya semakin kecil penghasilan kepala keluarga maka semakin besar kemungkinan kepala keluarga untuk melakukan pengurangan jam kerja. Pada lingkup isteri, variabel penghasilan isteri berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengurangan jam kerja isteri. Sehingga mencerminkan bahwa semakin kecil penghasilan isteri, maka semakin besar kemungkinan isteri dalam melakukan pengurangan jam kerja. Variabel penghasilan kepala keluarga dan penghasilan isteri sejalan dengan variabel proporsi penghasilan rumah tangga dimana semakin rendah penghasilan dan proporsi penghasilan maka memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menurunkan jam kerjanya. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini, rumah tangga sebagai keluarga pra sejahtera atau miskin memiliki penghasilan relatif rendah, tidak jarang ditemukan beberapa rumah tangga cenderung pasrah dengan penghasilan yang selama ini diperoleh. Perilaku tersebut

menunjukkan etos kerja yang dimiliki rumah tangga cenderung rendah, sehingga ketika terdapat bantuan PKH, rumah tangga tersebut cenderung untuk lebih menikmati waktu luangnya dan mengurangi jam kerjanya. Pada kepala keluarga, penghasilan kepala keluarga yang jumlahnya sedikit menjadi terbantu atau tertutupi oleh adanya bantuan PKH, sehingga kepala keluarga memilih untuk melakukan pengurangan jam kerja dengan beralih pekerjaan lain ataupun secara langsung mengurangi jam kerja pada pekerjaannya saat itu. Parker & Skoufias (2000) menunjukkan hasil yang sejalan, dimana ditemukann bahwa pada individu yang tidak berupah, partisipasi seseorang dalam bekerja akan menurun ketika adanya bantuan program transfer pemerintah. Hal serupa juga ditemukan pada penelitian Skoufias & Maro (2008) yang menyatakan bahwa bantuan sosial menyebabkan dampak pengurangan partisipasi pekerja yang berupah rendah atau tidak berupah.

Jumlah Tanggungan Keluarga

Variabel jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pada bantuan PKH tergantung pada komponen PKH yang dimiliki rumah tangga dan tidak melihat seberapa banyak tanggungan rumah tangga atau keluarga tersebut. Oleh karena itu, terdapat rumah tangga yang memiliki banyak tanggungan keluarga namun hanya sedikit anggota keluarganya yang mendapatkan bantuan PKH, sebaliknya, terdapat rumah tangga yang memiliki jumlah tanggungan keluarga yang lebih sedikit namun seluruh tanggungan keluarga tersebut memperoleh bantuan PKH karena memenuhi persyaratan komponen PKH. Namun tidak menutup kemungkinan pula rumah tangga dengan jumlah tanggungan keluarga yang banyak memperoleh bantuan PKH yang banyak pula. Hal tersebut tergantung pada seberapa

banyak komponen PKH yang dimiliki suatu rumah tangga tanpa melihat keseluruhan anggota rumah tangga, sehingga hal tersebut tidak dapat dipastikan.

Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan variabel pendidikan kepala keluarga memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan jam kerja kepala keluarga. Hasil serupa juga ditemukan pada lingkup isteri dimana ditemukan bahwa variabel pendidikan isteri memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengurangan jam kerja isteri. Hal tersebut sama seperti dengan temuan Rasyid (2012) dimana tingkat pendidikan tidak cukup signifikan dalam mempengaruhi kemungkinan penerima manfaat bantuan dalam bekerja. Kemudian pada penelitian Vere (2011), individu lansia yang memiliki pendidikan rendah cenderung lebih responsif terhadap jaminan sosial. Adapun justifikasi mengenai keadaan ini, dimana rumah tangga dalam penelitian ini merupakan rumah tangga pra sejahtera atau keluarga miskin sehingga kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah. Oleh karenanya, pendidikan tidak dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari.

Usia

Berdasarkan tabel 5, variabel usia kepala keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jam kerja kepala keluarga rumah tangga KPM di Kecamatan Bulakamba. Sedangkan pada sisi isteri, variabel usia isteri menunjukkan nilai signifikansi dan negatif sehingga memiliki arti bahwa faktor usia berpengaruh signifikan terhadap keputusan isteri dalam memutuskan untuk menurunkan atau mengurangi jam kerjanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa, bertambahnya usia isteri maka semakin besar kemungkinan isteri dalam memutuskan

untuk tidak menurunkan jam kerja. Adapun penjelasan mengenai mengapa pengurangan jam kerja terjadi pada isteri yang usianya lebih muda. Beberapa diantara komponen-komponen yang harus dimiliki KPM Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya memiliki anak balita dan anak usia sekolah atau bahkan ibu hamil. Hampir semua wanita atau isteri pada rumah tangga yang memiliki komponen tersebut paling banyak dimiliki oleh wanita yang memiliki usia yang relatif muda. Sehingga wanita muda lebih memiliki peluang untuk memenuhi beberapa komponen bantuan PKH dalam suatu rumah tangga. Sedangkan wanita yang memiliki usia lebih tua komponen yang dimilikinya tidak sebanyak wanita dengan usia lebih muda. Oleh karena itu, pada penelitian ini, wanita yang usianya relatif lebih tua cenderung tetap melakukan pekerjaan seperti biasa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengurangan jam kerja rumah tangga dilihat dari pengurangan jam kerja kepala keluarga (suami) dan isteri. Pada lingkup rumah tangga keseluruhan, proporsi bantuan PKH berpengaruh positif signifikan terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga, sedangkan proporsi penghasilan rumah tangga berpengaruh negatif terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga. Kemudian pada jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jam kerja rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan besarnya bantuan PKH ditentukan oleh komponen yang dimiliki suatu rumah tangga KPM dan tidak melihat jumlah tanggungan keluarga. Sehingga terdapat rumah tangga yang memiliki banyak jumlah tanggungan keluarga namun hanya

- memenuhi sedikit komponen PKH, dan sebaliknya.
2. Pada lingkup kepala keluarga, penghasilan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengurangan jam kerja kepala keluarga. Kemudian proporsi bantuan PKH, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan usia kepala keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan jam kerja kepala keluarga. Hal tersebut dikarenakan bagi sebagian besar kepala keluarga tetap harus bekerja karena jumlah bantuan PKH relatif sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga KPM secara keseluruhan jika kepala keluarga tidak bekerja. Kemudian dengan keadaan rumah tangga yang miskin, kepala keluarga akan cenderung tetap bekerja tidak terpengaruh oleh pendidikan maupun usianya.
 3. Pada lingkup isteri, proporsi bantuan PKH berpengaruh positif signifikan terhadap pengurangan jam kerja isteri. Kemudian penghasilan isteri dan usia isteri berpengaruh negatif signifikan terhadap pengurangan jam kerja isteri. Sedangkan jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan isteri berpengaruh tidak signifikan terhadap pengurangan jam kerja isteri. PKH menyesuaikan dana bantuan dengan komponen PKH yang dimiliki rumah tangga, bukan berdasarkan pada jumlah tanggungan keluarga yang dimiliki. Kemudian pendidikan isteri cenderung rendah sehingga tidak memiliki peran besar dalam keputusan bekerja.
 4. Bantuan PKH menurunkan jam kerja rumah tangga secara keseluruhan. Pengurangan jam kerja rumah tangga tersebut terjadi pada rumah tangga yang memiliki proporsi bantuan PKH relatif besar terhadap pengeluaran rumah tangga tersebut. Bantuan PKH mengurangi waktu isteri dalam bekerja sehingga isteri lebih memilih waktunya digunakan untuk

aktivitas lain di luar bekerja. Sedangkan bantuan PKH cenderung tidak mengubah jam kerja kepala keluarga, dimana kepala keluarga cenderung akan tetap bekerja untuk tetap memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya.

Saran

Berikut merupakan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh:

1. Pemberian bantuan PKH harus disertai dengan syarat bahwa penerima manfaat harus dapat menunjukkan kemajuan dari kondisi rumah tangganya, seperti memiliki atau membuka wirausaha (sebagai suatu misal). Kemudian untuk menghilangkan kecenderungan rumah tangga dalam bergantung pada PKH dan untuk mempercepat kemandirian KPM PKH pemerintah harus menggalakkan kegiatan wirausaha atau peningkatan ekonomi keluarga yang sudah ada, atau menciptakan kegiatan serupa disesuaikan dengan kondisi masyarakat miskin.
2. Pengurangan jam kerja rumah tangga yang terkonsentrasi pada isteri menunjukkan adanya perubahan perilaku yang terjadi di dalam rumah tangga. PKH. Penelitian ini menemukan terdapat 42 rumah tangga KPM di Kecamatan Bulakamba yang menerima PKH sejak awal yaitu tahun 2011 hingga kini tahun 2020, sehingga menunjukkan belum adanya aturan yang jelas mengenai batas maksimal bagi rumah tangga dalam memperoleh PKH. Pemberdayaan KPM PKH yang dilakukan, seperti pelatihan, diklat, *workshop*, maupun *family gathering*, belum memberi dampak yang signifikan pada kehidupan penerima manfaat PKH di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Berdasarkan hal ini, diperlukan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan pada KPM PKH dengan

mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada. Selain itu diperlukan pula aturan mengenai batasan yang jelas mengenai waktu maksimal perolehan bantuan. Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh pemangku kepentingan, pelaksana PKH, dan masyarakat mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari program ini.

Implikasi dan Keterbatasan

1. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian. Cakupan wilayah yang lebih luas bertujuan agar penelitian lebih komprehensif dan memperoleh hasil yang lebih baik dalam menggambarkan keadaan/kondisi suatu wilayah. Kemudian, keadaan/kondisi rumah tangga yang diteliti diharapkan lebih bervariasi sehingga dapat melihat perubahan perilaku rumah tangga dalam bekerja dari berbagai keadaan atau kondisi rumah tangga yang ada.
2. Untuk penelitian vnb selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan metode yang berbeda untuk melihat pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap insentif bekerja atau pengurangan jam kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alzúa, M. L., Cruces, G., & Ripani, L. (2013). Welfare programs and labor supply in developing countries: Experimental evidence from Latin America. *Journal of Population Economics*, 26(4), 1255–1284.
- Bingley, P., & Walker, I. (2013). *The labour supply effects of a partial cash-out of in-kind transfers to single mothers*. 1–28.
- Borjas, G. J. (2012). *Labor Economics* (6th editio). London, United States: McGraw-Hill Education - Europe.
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2009). *Modern Labor Economics (Theory and Public Policy)* (Tenth Edit; D. Clinton, ed.). Pearson Education, Inc., Rights and Contracts Departement, 501 Boylston Street, Suite 900, Boston, MA 02116.
- Kaufman, B. E., & Hotchkiss, J. L. (1999). *The Economics of Labor Markets* (Fifth Edit).
- Parker, S. W., & Skoufias, E. (2000). The Impact of PROGRESA on work, Leisure, adn time allocation. *International Food Policy Research Institute*, (Final Report).
- Payaman, J Simanjuntak. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit FE UI.
- Priifti, E., Estruch, E., Daidone, S., & Davis, B. (2019). How much is too much: Does the size of income support transfers affect labor supply? *Journal of Policy Modeling*, 41(1), 179–196.
- Skoufias, E., & Maro, V. Di. (2008). *The Journal of Development Conditional Cash Transfers , Adult Work Incentives , and Poverty*. (November 2014), 37–41.
- Stiglitz, J. (2000). Economics of The Public Sector. In E. Parsons (Ed.), *Economics of the Public Sector* (Thurd Edit). New York.
- Teixeira, C. G. (2010). A heterogeneity analysis of the Bolsa Familia programme effect on men and women’s work supply. *Working Paper IPC-IG*, (61). Retrieved
- Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH). 2019. Kecamatan Bulakamba, Brebes.
- Vere, J. P. (2011). Social Security and elderly labor supply : Evidence from the Health and Retirement Study ☆. *Labour Economics*, 18(5), 676–686.
- Williamson, H., & Whitmore, D. (2012). Work incentives and the Food Stamp Program ☆. *Journal of Public Economics*, 96(1–2), 151–162.